

EDITORIAL

NEGARA MISKIN KEADILAN

Sirna sudah harapan dan keinginan para jemaat Gekindo Getsemane Jatimulya untuk bisa mencecap keadilan di negeri yang penuh dengan keragaman ini. Pertengahan bulan Juni 2008 lalu, pihak Kecamatan Tambun Selatan bekerjasama dengan aparat kepolisian dan Trantib membongkar gereja mereka. Kini, tak ada lagi rumah ibadah, tak ada pula kepastian nasib bagi mereka.

Mereka pun kini menempuh cara hidup layaknya masyarakat nomaden. Untuk sekadar menunaikan ibadah, harus rela berpindah-pindah tempat dari rumah jemaat satu ke rumah jemaat lainnya.

Pembongkaran gereja itu adalah puncak dari penderitaan dan cerita pahit mereka. Tahun 2005 lalu, jalan utama menuju gereja diblokir oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan agama tertentu dengan alasan tak punya izin dan mengganggu warga setempat. Sejak saat itu pula, jemaat Gekindo terpaksa harus beribadah di jalan selama berbulan-bulan.

Ironis memang. Negara yang mustinya menjamin serta melindungi hak kebebasan beragama mereka justru berubah menjadi monster ganas yang mencabik-cabik hak itu, terhadap kelompok agama yang nota bene sudah diakui secara resmi pula.

Tapi itulah kenyataannya. Negara lebih melayani dan tunduk pada kepentingan kelompok-kelompok bringas yang jauh dari rasa toleran.

Desantara

Gereja Gekindo Getsemane:

SETELAH DUA TAHUN DISEGEL, KINI
DIBONGKAR

Oleh: Ingwuri H.



GEREJA GEKINDO GETSEMANE SETELAH DIBONGKAR

Puluhan jemaat Gekindo (Gereja Kristen Indonesia) Getsemane Jatimulya tampak khusuk memanjatkan doa di dalam gereja yang beberapa asbesnya sudah jebol. Tak ada kursi, tak ada pula mimbar yang selama ini biasa mereka pakai saat memanjatkan doa. Semuanya raib dicuri orang.

Sehari sebelumnya, 14 Juni 2008, di tempat itu pula, puluhan anggota Kepolisian Resort Bekasi dan Sektor Tambun dibantu Trantib (ketentraman dan ketertiban) melakukan pembongkaran terhadap gereja Gekindo Getsemane yang terletak di Jl. Melati Raya Ujung, Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi. Terlihat pula Camat Tambun, Drs. H. Tuftana, MM dan Kapolsek Tambun Selatan.

Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Saat itu, Pendeta Pestarya (Gekindo) sendiri tidak berada di lokasi. Ia baru ke sana setelah ditelepon oleh salah seorang warga sekitar pukul 09.00 WIB. Pendeta Pestarya yang kaget itu kemudian menghubungi para jemaatnya untuk segera berkumpul di lokasi. Beberapa protes dilakukan, tapi Camat Tambun tak menggubrisnya.

Begitu tiba di lokasi, tak ada lagi yang bisa dilakukan mereka, kecuali sebelum pembongkaran dilakukan, Pestarya meminta

kepada Camat Tambun untuk diberi kesempatan berdoa terlebih dahulu. Doa pun berlangsung dengan singkat, diiringi tetesan air mata para jemaat yang tak kuasa menerima itu semua. Usai doa, Camat langsung memerintahkan Satpol PP untuk membongkarnya: Bongkar! Begitu teriakannya.

Cerita Sebelumnya

Bermula dari tanggal 8 Juni 2008. Waktu itu, Pendeta Pestarya dengan tiga jemaatnya melakukan kunjungan ke salah satu jemaat Gekindo yang sedang sakit. Selesai kunjungan, ia bersama tiga jemaatnya, ingin melewati Gereja Gekindo yang sudah disegel sejak 30 Oktober 2005 yang lalu. "Lewat gereja kita yuk, kangen juga ke sana," ajaknya. Sejak disegel itu pula, berminggu-minggu lamanya mereka melaksanakan kebaktian di jalan.

Betapa terkejutnya mereka sesampainya di sana. Ia melihat, pagar gereja sudah tidak ada. Merasa penasaran, mereka kemudian masuk ke dalam gereja. Sebagian nako dan pintunya sudah tiada. Mereka pun baru sadar bahwa seisi gereja telah raib. Bangku-bangku, mimbar, meja, dan yang lainnya. "Ya pokoknya semua barang yang memang kami butuhkan setiap beribadah," tutur Pendeta Pestarya. Dia kemudian mengajak jemaatnya untuk berdoa di atas serakan puing-puing di dalam gereja. "Sudah lah, tak usah menangis. Semuanya sudah seperti ini," katanya menenangkan jemaat usai berdoa.

Dua hari setelah kedatangan mereka ke gereja, tepatnya tanggal 10 Juni 2008, pihak kelurahan Jatimulya mengeluarkan surat buat Gekindo dan HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), yang juga berada di Jl. Melati Raya Ujung. Surat bernomor Ag. 32/165/VI/2008 itu berisi, undangan rapat di kantor Kepala Desa Jatimulya pada pukul 14.00. Undangan itu didasarkan pada surat Camat Tambun Selatan nomor 300/35/Trantib tertanggal 20 Januari 2006 tentang himbauan ke III dan pengumuman Bupati Bekasi nomor 452.2/300/

DAFTAR ISI:

Desantara Report	1
Testimony	5
Local Community	6
Profile	7
Vox Vocis	8
Multicultural Women	9
Citizenship	10
Representation	11
Desantara's Activities	12

Huk tertanggal 1 Maret 2006.

Pendeta Pestarya Hutajulu br Silalahi (Gekindo) dan Pdt. Erwin Marbun (HKBP) pun berangkat ke kelurahan. Di kelurahan, telah hadir Kepala Desa Jatimulya, utusan Camat Tambun Selatan (Firman dan Untung Subekti), Suparto dari kepolisian Sektor Tambun Selatan, Kamdani dari Koramil, Ust. Fauzi Muclas dan Ketua RT 18 Hidayat. Dalam rapat tersebut, pihak kecamatan menyampaikan perintah kepada kedua pendeta untuk mengosongkan rumah tinggal yang dijadikan rumah ibadah dari ornamen-ornamen yang ada sampai batas waktu Jumat, 13 Juni 2008 pukul 16.00 WIB. Karena, pada Sabtu pukul 09.00 akan diselenggarakan pembongkaran oleh pihak Kecamatan.

Seusai dari kelurahan, kedua pendeta meminta saran dari kuasa hukum Tim Pembela Kebebasan Beragama (TPKB).

Oleh TPKB, jemaat disuruh berkumpul. Pada hari itu juga mereka pun berkumpul. Dari pertemuan dengan TPKB, mereka disarankan untuk ke Polda Metro Jaya dan Komnas HAM. Esok harinya, 12 Juni 2008, mereka ke Polda dan kemudian ke Komnas HAM. Dari Komnas HAM, dua gereja ini mendapat surat rekomendasi kepada kecamatan Tambun Selatan untuk meninjau pembongkaran gereja. Karena, berdasar dari perjanjian tanggal 30 Oktober 2005, lahan dan izin bagi gereja Gekindo dan HKBP belum direalisasikan.

Surat dari Komnas HAM inilah yang kemudian, pada tanggal 13 Juni 2008 diserahkan kepada para pejabat di Bekasi, mulai dari Bupati sampai Kepala Desa. Namun, surat itu tetap tak mampu menolong nasib mereka. Buktinya, tanggal 14 Juni 2008, pihak kecamatan tetap membongkar gereja. []

MAULID HIJAU DIFATWA SESAT, MUI DIGUGAT WARGA

Oleh: Muhammad Kodim

Trend 'Fatwa Sesat' sudah menjalar kemana-mana. Tak hanya di Pusat, MUI Daerah pun kini berlomba-lomba menggunakannya. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 2 Januari 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan

dan kebenaran Al-Qur'an, (3). Menghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul. Pernyataan MUI Klakah ini tertuang dalam Surat Fatwa Larangan, Nomor: 073/CI/MUI/08, tanggal 2 Januari 2008.



MAULID HIJAU

Klakah menjatuhkan fatwa sesatnya kepada 'Maulid Hijau', sebuah kegiatan rutinitas tahunan warga Tegalarandu.

Kegiatan yang diniatkan oleh warga sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan dan tradisi setempat serta mempromosikan pariwisata yang berupa Ranu (Danau) tersebut, oleh MUI kecamatan Klakah dinilai melanggar tiga dari 10 Kriteria Aliran Sesat, yaitu: (1). Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, (2). Mengingkari autentisitas

Awalnya, MUI Klakah mempersoalkan penggunaan nama 'Maulid Hijau'. Kata 'Maulid' merujuk pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sementara kata 'Hijau' merujuk pada kegiatan penghijauan desa Tegalarandu sebagai desa pariwisata yang memiliki potensi dan tradisi unik.

Namun, permasalahannya kemudian bergeser. MUI Klakah giliran mempersoalkan acara Selamatan Desa yang di dalamnya ada *Larung Sajen*, karena dianggap tidak sesuai dengan Islam. Jelasnya, acara *Larung Sajen* ini biasanya

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab:
M. Nurkhoiron

Pemimpin Redaksi:
Muhammad Kodim

Sekretaris:
Noviyana

Keuangan:
Darningsih

Redaktur Pelaksana:
Ingwuri H.

Tata Letak/Desain:
N. Ruth

Editor Bhs. Indonesia:
M. Nurkhoiron

Editor Bhs. Inggris:
Alexandra Crosby

Penerjemah:
S. B. Setiawan, Robertus Donny

Staf Redaksi:
Franditya Utomo, Akbar Yumni

Dokumentasi:
Rustam

Kontributor:
Jawa Barat: Abu Bakar, Isa N., Diphie. **Jawa Timur:** Mashuri, Oryza Ardyansyah W., Ishomuddin, A'ak Abdullah Al-Kudus, Ahmad Rifa'i. **Bali:** Ni Komang Erviani. **NTB:** Muhammad Irham. **Sulsel:** Mubarak Idrus, Hasmi Baharuddin. **Sulteng:** Ewin Laudjeng. **Sulbar:** Tamsil Kanang. **Kaltim:** Asman Azis. **Kalbar:** Chatarina P. Istiyani. **Sumbar:** Ka'baty. **Sumut:** Farid Aulia. **Aceh:** Raihana.

Alamat Redaksi:
DESANTARA Foundation
Jl. Pemuda 35 Depok
Indonesia 16431

Website: www.desantara.org/deport
Email Redaksi: newsletter@desantara.org

Tlp: +62 21 7775425
Fax: +62 21 77201121

ISSN 1979-7354



9 771979 735446

dilakukan dalam bentuk selamatan dan do'a bersama dengan para sesepuh desa sesuai dengan tradisi agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan melarungkan semacam sesaji ke tengah Ranu Klakah. Adapun sesaji yang dilarungkan tersebut berbentuk boneka kecil yang terbuat dari tepung terigu. Dan, tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun.

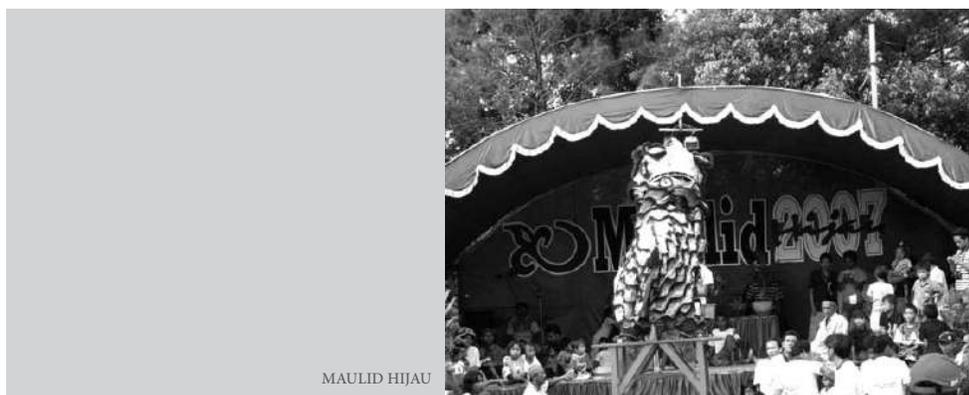
Secara keseluruhan, kegiatan 'Maulid Hijau' ini meliputi: peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, penghijauan, selamatan desa, pasar rakyat, perlombaan, dan pagelaran kesenian. Ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya, dan rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 23 – 25 Mei 2008. 'Maulid Hijau' pertama kali diselenggarakan pada April 2006, dan yang kedua pada April 2007. Karena difatwa sesat, maka kegiatan ketiga ini pun urung.

Dinilai Cacat, Panitia Gugat MUI Lewat Jalur Hukum

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Maulid Hijau, A'ak Abdullah Al-Kudus, menyatakan bahwa Fatwa tersebut cacat administrasi dan prosedural. Sebab, MUI tingkat kecamatan dan kabupaten tidak berhak untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Sebagaimana telah diatur sendiri oleh MUI dalam SK No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa, bahwa

yang seragam, bahwa tanda tangan yang dilampirkan dalam Surat Keputusan Fatwa

KUHP serta Terorisme UU nomor 15 / 2003.



MAULID HIJAU

tersebut sebenarnya adalah DAFTAR HADIR dalam acara pertemuan rutin, *yasinan* dan *istighosah* warga *Jam'iyyah Nahdlatul Ulama* ranting Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2007 di rumah Bapak Yusuf," terang A'ak.

Karena fatwa tersebut dianggap gelap, tanpa prosedur resmi, akhirnya pada tanggal 20 Januari 2008 panitia 'Maulid Hijau' mengirimkan surat somasi ke pihak MUI kecamatan Klakah yang juga diteruskan ke MUI pusat dan MUI Provinsi Jawa Timur serta Muspida Kabupaten Lumajang. Dalam surat tersebut, panitia Maulid Hijau menuntut MUI Kecamatan Klakah untuk

Tak mau kalah dengan panitia, pada tanggal 1 Februari 2008, MUI Klakah melaporkan balik panitia ke Mapolres Lumajang dengan tuduhan pencemaran nama baik. Menurut MUI, tuntutan minta maaf dari panitia Maulid Hijau tersebut adalah tindakan main hakim sendiri. Untuk memperkuat gerakannya, MUI Klakah didukung oleh MUI Kabupaten Lumajang melakukan kampanye anti Maulid Hijau dengan cara menggalang dukungan dari para kyai/ulama di Kabupaten Lumajang, melalui khutbah jum'at di masjid-masjid dan di majelis taklim lainnya, menerbitkan dan menyebarkan bulletin *Al-i'tishom* yang intinya mengemak panitia Maulid Hijau dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), salah satu pihak yang mendukung

Maulid Hijau, sebagai pembela kemusyrikan, serta menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk turut melawannya.

Begitu pula dengan panitia Maulid Hijau,

mereka terus melakukan pendekatan intensif ke beberapa tokoh di Lumajang dan juga menggalang dukungan di tingkat nasional seperti ke Komnas HAM, Perguruan Rakyat Merdeka, Wahid Institute, dan lain-lain. Beberapa lembaga advokasi seperti LBH Surabaya, LBH Jakarta, PBHI, YLBHI, Elsam dan KBHR telah menyediakan tim pengacaranya untuk memback-up panitia Maulid Hijau.

Upaya-upaya perlawanan panitia Maulid Hijau rupanya cukup membuat MUI Lumajang panik dan keder. Para tokoh MUI Lumajang akhirnya segera menemui Pemkab Lumajang untuk menyerahkan kasus ini. MUI yakin, dengan ditanganinya kasus tersebut oleh Bupati secara langsung, masalah ini bisa selesai secara damai dan baik. []

Lebih fatal lagi, 80 tanda tangan yang dilampirkan dalam surat keputusan fatwa tersebut sebagian besar palsu.

yang berhak mengeluarkan fatwa hanyalah MUI Pusat. Oleh karena itu, MUI Klakah dinilai justru menerobos aturan tersebut. Dalam SK yang sama, tepatnya pasal 2 ayat 3, juga mengatur bahwa sebelum pengambilan keputusan perlu di lakukan proses klarifikasi (*tabayyun*). Namun MUI Klakah tidak menempuh langkah tersebut, karenanya dianggap menyalahi prosedur.

Lebih fatal lagi, 80 tanda tangan yang dilampirkan dalam surat keputusan fatwa tersebut sebagian besar palsu. "Kami dari pihak Panitia Maulid Hijau sudah melakukan konfirmasi langsung satu persatu secara terpisah dengan sebagian besar dari para penanda tangan khususnya pada lembar kedua yang mayoritas penandatngannya adalah masyarakat desa Tegalrandu. Dari semua yang kami datangi, kami mendapat keterangan

mencabut Surat Fatwa Larangan yang telah dikeluarkannya dan meminta maaf secara langsung dan terbuka kepada warga dalam tempo seminggu.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, MUI Klakah tidak juga memenuhi tuntutan tersebut. Maka pada tanggal 29 Januari 2008, pihak panitia didampingi oleh tokoh masyarakat dan kepala desa Tegalrandu serta Tim Pengacaranya melaporkan kasus ini ke Mapolres Lumajang. Ada enam pasal yang dituntut oleh pihak panitia Maulid Hijau terhadap MUI kecamatan Klakah, yakni Penghinaan Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP, Fitnah Pasal 311 ayat 1 KUHP, Penghasutan Pasal 161 ayat 1 KUHP, Menebar kebencian Pasal 157 ayat 1 KUHP, Pemalsuan Surat Pasal 263 ayat 1 dan 2

CAHAYA TV, BELUM TAYANG SUDAH DILARANG

Oleh: Abu Bakar



CAHAYA TV

Bermula dari penolakan pendirian bangunan Cahaya TV di kawasan Argasunya 4 April 2008, massa yang terdiri dari Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS) dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) mengerahkan sekitar 100 orang untuk mendatangi Balaikota Kota Cirebon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cirebon.

Aksi massa itu kemudian diteruskan ke Argasunya, tempat dimana Cahaya TV akan didirikan. Dalam aksinya, massa yang sebagian mengenakan baju putih dan rompi hitam ini menuntut sikap tegas Pemerintah Kota Cirebon untuk mencabut izin terhadap TV tersebut, karena dianggap meresahkan umat Islam.

GAPAS dan FUI mensinyalir bahwa dengan didirikannya Cahaya TV di Desa Argasunya, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ini akan merusak kehidupan beragama di Kota Cirebon, khususnya masyarakat Argasunya. Palsanya, mereka menduga Cahaya TV akan melakukan upaya-upaya kristenisasi terhadap masyarakat setempat. Kekhawatiran semacam ini muncul lantaran sang pemilik TV tersebut dari kelompok Kristen. Faktanya, Cahaya TV sendiri baru dalam tahap mengurus proses pendirian dan perizinan siaran. Oleh karena itu, dugaan dan kekhawatiran GAPAS dan FUI dianggap tidak beralasan.

Keresahan massa ini diduga kuat karena keberadaan TV tersebut akan menyiarkan acara kerohanian agama tertentu. "Kami meminta kepada Pemkot mencabut izin

teknis PT Cirebon Televisi Indonesia atau Cahaya TV, serta memberhentikan pembangunan gedung dan tower di Argasunya, Kecamatan Harjamukti, karena berpotensi menimbulkan bahaya konflik dan keresahan antarumat beragama di wilayah III Cirebon," papar perwakilan massa di depan Balaikota Cirebon.

Dalam aksi massa pertama, mereka tidak mendapat respon dari Walikota Cirebon, Subardi, SPd. Massa lalu melempari telur busuk serta

membakar sebuah duplikasi TV sebagai penolakan simbolis atas keberadaan stasiun TV tersebut.

Massa yang terdiri dari kelompok FUI dan GAPAS tersebut lalu mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cirebon. Menurut keterangan Rohaedy Yoedhy, PT Cirebon Televisi Indonesia sudah memiliki izin, bahkan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Disperindag juga sudah dipenuhi. Seperti izin dari tetangga lokasi pembangunan, rekomendasi Dinas Perhubungan dan Rekomendasi Diskominfo.

"Kami hanya lembaga publik. Ketika ada yang ingin berinvestasi di Kota Cirebon, maka akan diberikan izin karena membuka lapangan kerja baru. Walaupun ada keberatan dari masyarakat karena digunakan untuk penyiaran agama tertentu, bisa saja Pemkot meninjau ulang izinnya," papar Ir. Rohaedy Yoedhy, MM, Ketua Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cirebon, menyikapi tuntutan massa Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS) terkait pencabutan izin pendirian Cirebon TV April lalu.

Cahaya TV sendiri telah memiliki perizinan mendirikan bangunan di lokasi Argasunya menurut Surat Izin Fatwa Rencana Pengarah Lokasi No 503/185 tentang Pemilihan Lokasi di Argasunya yang ditandatangani Subardi, SPd pada 18 Februari 2008.

Tetapi, ketidakpuasan massa tetap tak tertahankan. Sebagai bentuk ketidakpuasan atas sikap Pemerintah Kota Cirebon, massa pun mendatangi lokasi pembangunan dan pendirian Cirebon TV (CTV) di Argasunya. Massa menyegel bangunan TV tersebut dengan spanduk yang bertuliskan "TV Misionaris Ini Disegel Oleh Umat Islam Wilayah III Cirebon Karena Berpotensi Menjadi Media Pemurtadan dan Kristenisasi". Alan Endy Pasha, koordinator GAPAS menjelaskan penyegelan tersebut sebagai sikap tegas penolakan umat Islam se-wilayah III Cirebon terhadap Cahaya TV yang akan menjadikan Cirebon sebagai Kota Wali menjadi lahan pemurtadan dan Kristenisasi.

Beberapa hari setelah penyegelan, tepatnya tanggal 15 April 2008, terjadi aksi

penolakan ke-dua. Selain GAPAS dan FUI, penolakan kali ini melibatkan santri asal PP Benda Kerep dan masyarakat Argasunya. Menurut keterangan warga setempat, penyegelan ini disebabkan karena spanduk penyegelan yang dipasang FUI dan GAPAS sebelumnya

diturunkan oleh beberapa orang tak dikenal yang diduga keberatan atas penyegelan tersebut. Tindakan pencopotan segel oleh orang tak dikenal ini tampaknya mengundang reaksi warga setempat untuk bersama dengan GAPAS memasang kembali segel penolakan terhadap bangunan studio CTV. "Stasiun TV Bermasalah Ini, Disegel!! Oleh Kami. Warga Argasunya Dengan Dukungan Umat Islam," demikian isi segel itu. [Sumber data: Fahmina Institute]



CAHAYA TV

Kasus pembongkaran gereja Gekindo Getsemane oleh Camat Tambun Selatan, Bekasi, memiliki cerita panjang nun memilukan. Berikut kesaksian Pendeta Pestarya Hutajulu:

Tanggal 12 juni 2008, saya dengan pak Marbun (pendeta HKBP Jati Mulya), pergi ke seluruh pejabat: ke Bupati, ke Sekda, ke Camat, ke Polsek ke Lurah, kemana saja yang berkaitan. Kami antar surat dari Komnas HAM dan surat laporan kami ke Polda. Sebenarnya, kami sangat berharap mereka tidak lagi membongkar.

Nyatanya, tanggal 14 juni 2008, mereka datang. Saya tidak pergi ke sana. Tapi, saya ditelepon oleh orang-orang di situ. "Tbu Pestarya datang ke sini, sudah banyak orang datang ke sini, gereja mau dibongkar."

Akhirnya saya pergi ke sana. Saya telepon-telepon jemaat, akhirnya mereka datang. Lalu, kami kumpul di gereja. Benar. Aparat kecamatan datang.

Saya berfikir, "Tuhan saya masih perlu ngomong lagi nggak?" batin saya. Saya betul-betul bergumul. Rasanya, saya tidak bisa lagi melawan jeritan hati saya. Tetapi saya harus katakan dalam hati: "Tuhan aku



PENDETA PESTARYA HUTAJULU

"Kalau Tuhan mau kasih, bagi Tuhan tidak mustahil. Marilah kita menangisi bangsa ini, karena di tengah-tengah bangsa ini

tidak mau lagi negoisasi dengan siapapun." Saya tidak mau lagi wawancara, tidak mau lagi ada pertemuan. Saya hanya mau

MARILAH KITA MENANGISI BANGSA INI

Oleh: Ingwuri H.

harus bisa menguasai diri, Tuhan tolong saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku harus bisa menguasai diri."

Ada Kapolsek di sana. Dan, dari Polres juga hadir. Banyak polisi di situ. Mereka memakai pakaian dinas seragam lengkap. Lalu, saya bilang ke Pak Camat: "Pak apakah harus dibongkar?" Dia diam. Lalu saya berkata, "Baik lah karena saya punya Tuhan mengajar saya untuk menghormati pemerintah, di Al Kitab, tertulis bahwa, pemerintah itu adalah Hamba Allah. Jadi saya tidak mau berbantah-bantah. Tapi sebelum bapak membongkarnya, izin kan kami berdoa dulu."

Dia diam. Akhirnya saya pimpin doa. Begitu selesai berdoa, Pak Camat bilang, "Bongkar!" Trantib langsung naik ke atas. Kemana-mana. Jendela yang masih ada, pintu-pintu yang masih ada dibuka. Waktu naik ke atas, saya katakan ke jemaat, "Tolong supaya tidak ada yang menangisi lagi. Tidak perlu kita harus menangisi gedung ini, tangisi saja lah dirimu. Tangisilah bangsa ini, tangisilah pejabat-pejabat bangsa ini, tangisilah pemerintah karena sudah tidak ada lagi keadilan di sini, jangan tangisi gedung ini. Gedung ini, halah, hanya fisik doang".

sudah tidak ada lagi keadilan, di tengah-tengah bangsa ini sudah tidak ada lagi hati. Semua sudah mati rohani. Hati nuraninya sudah mati." Saya kemudian bilang ke Pak Camat, "Ingat pak, kalau bapak masih punya hati nurani, jangan lakukan. Karena, barang siapa yang membinasakan milik Allah pasti akan mendapat hukuman-Nya. Tapi saya bukan menakut-nakuti. Saya hanya mengingatkan saja."

Tapi, tetap saja dibongkar. Naik lah mereka ke atas. Waktu asbes yang ke empat, ada satu orang yang jatuh. Kami ingin melihat. Tapi, kami tidak boleh masuk ke lokasi. Mereka sudah melakukan pagar betis. Dan tiba-tiba, entah kapan instruksinya, mereka bubar. Camat pergi. Kapolsek juga pergi. Satu per satu pergi. Akhirnya, pembongkaran berhenti di situ. Setelah ada yang jatuh.

Tanggal 15 Juni, apapun yang terjadi, saya akan kebaktian di sini. Apapun yang terjadi. Mempertahankan kepunyaan saya, saya berani mati. Tanggal 15, kami HKBP dan Gekindo, beribadah di sana.

Mulai tanggal 16 Juni, suasana heboh. Bolak-balik saya ditelepon. Saya bilang, "Saya orangnya keras dalam hal ini. Saya

realisasi pernyataan tanggal 30 Oktober 2005.

Hari Senin, Selasa, Kamis, seluruhnya ingin bertemu. Teman-teman pendeta telepon, "Saya minta tolong ibu." Saya bilang, "Tidak. Sama siapapun saya tidak percaya. Jangan kan Kapolsek, Kapolsek, Kapolda saja tidak digubris." Bahkan, tanggal 31, saat saya ke puncak, saya matikan telepon genggam saya. Sekitar jam satu siang, khawatir baterai habis, saya buka telepon. Begitu saya periksa, ada 99 panggilan. Ketika sedang terbuka itu, telepon lah Pak Marbun: "Tolong Inang, saya minta maaf." Saya katakan, "Mati pun di tempat saya sudah siap. Saya tidak perlu takut. Besok pagi saya sudah di situ."

Subuh aku berangkat. Pagi, aku datang. Pagi, baru saya dengar berita, rupanya sudah disebarkan bahwa tidak boleh lagi ada kebaktian. Saya bengong. Saya sempat diam seribu bahasa.

Saya mungkin orang yang terlalu keras, tetapi saya tidak mencuri. Demi nama Tuhan, di Jatimulya ada empat ribu orang Kristen yang membutuhkan tempat beribadah. []

CARA BEDA TO MIMALA MEMAKNAI YANG ESA

Oleh: Tamsil

Belakangan ini, tampak ada yang beda dengan pelaksanaan ritual ajaran To Mimala di dusun Kaleok desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebelumnya, ritual selalu dilakukan di tempat tertutup dan hanya boleh diikuti oleh para penganutnya saja, namun akhir-akhir ini tidaklah demikian. Mereka menyelenggarakan di tempat terbuka dan boleh diikuti orang luar. Sebuah prosesi yang tak lagi tertutup.

Biasanya, ritual To Mimala dilakukan di hutan, sungai, batu dan kuburan. Dalam ritual, salah satu prosesinya adalah, memotong ayam. Darah ayam itu lalu ditampung dalam wadah-wadah yang sudah dipersiapkan sebelumnya; satu ekor satu wadah. Lalu, darah diminum separuhnya dan sisanya dibakar dalam daun pisang. Hasil pembakaran itu kemudian diberikan kepada sang pemilik hajat. Sementara sebagian sesajen lainnya digantung di rumah, di kebun, atau sawah—bergantung dari niat yang melakukan ritual To mimala.

Apa yang melatari dari perubahan ini? “Ritual dilakukan dengan terang-terangan karena orang luar semakin hari membuka lahan dan pemukiman baru di wilayah Kaleok,” tutur Ami, salah seorang penganut ajaran To Mimala. Karenanya, tambah Ami, tidak adanya tempat yang tak diketahui orang umum, membuat ritual dilakukan terang-terangan.

Mengenai nama To Mimala sendiri mengandung arti beragam. Kata “To”, dalam pengertian luas, adalah manusia sempurna atau orang yang paling di atas. Sedangkan kata “Mimala” bermakna alam. Mimala, juga kadang diartikan sebagai persembahan sesajen kepada dewata, penghargaan terhadap alam semesta, dan penolak *bala*. Ritual To Mimala sejatinya diperuntukkan kepada *Sang Barata*, Sang Pencipta alam semesta.

Dikejar-kejar

Karena dianggap musyrik, penganut ajaran To Mimala selalu dikejar-kejar oleh kelompok yang tidak menginginkan keberadaan mereka. Hingga kini, jika ketahuan melakukan ritual To Mimala, akan dibubarkan oleh warga dari Kampung Bawah. Inilah alasan mengapa ajaran yang satu ini sulit berkembang dan penganutnya kian hari kian menyusut.

Jika merunut sejarahnya, maka penganut To Mimala sebenarnya kenyang pengalaman soal bagaimana dia selalu dikejar-kejar dan diperlakukan layaknya komunitas “terlarang” karena ajarannya dianggap menyimpang dari Islam. Di tahun 1960-an mereka pernah dirazia oleh DI/TII, pimpinan Kahar Muzakar. Ceritanya, saat itu karena DII/TII diberantas oleh TNI 710 Diponegoro, mereka melakukan taktik gerilya dengan masuk ke hutan-hutan. Dan, salah satu hutan yang menjadi tempat gerilya adalah di desa Batetangnga, tempat To Mimala berada.

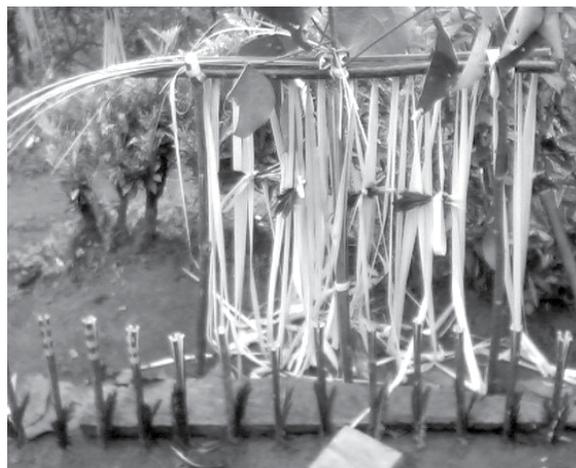
Karena melihat ritual To Mimala yang menyembah selain kepada Tuhan, anggota DI/TII lantas merazia dan membumihanguskan tempat tinggal para penganut kepercayaan tersebut. Mereka juga ditodong dan dipukul, hingga ada yang sampai tak sadarkan diri.

Razia DI/TII, membuat penganut ajaran To Mimala menyingkir ke pegunungan di sebelah utara Batetangnga. Pilihan tempat ini karena banyak terdapat batu-batu besar, sungai, atau pohon besar yang biasanya menjadi tempat ritual. Pengejaran itu pula lah yang juga tampaknya membuat penganut kepercayaan To Mimala merahasiakan diri saat melangsungkan sembahyang.

Padahal, sebagaimana kata H. Tima’, pohon, misalnya, bukanlah untuk sesembahan melainkan hanya medium saja. Karena yang disembah esensinya adalah Tuhan Yang Esa. Ini hanyalah cara serta bukti untuk melestarikan alam.

Senada dengan hal di atas, Simba, tokoh pemuda To Mimala, menegaskan bahwa niat bagi To Mimala melakukan sembahyang dengan ritual itu, muncul dari dalam hati seseorang tanpa ada paksaan. “Apapun, kalau niatnya salah, maka yang ia sembah adalah setan,” ungkap Simba. Jadi, “Yang menentukan apa yang diniatkan orang dalam sembahyang adalah orang itu sendiri.”

To Mimala sendiri, dalam ajarannya justru begitu toleran. Ini dibuktikan dengan adanya batu Sumandilo. Batu yang berada di Kaleok ini adalah batu persahabatan agama-agama. Batu Sumandilo, dibagi dalam tiga potongan. Di bagian depan,



RITUAL TO MIMALA

batu disimbolkan agama Islam, bagian tengah disimbolkan agama Kristen, dan bagian belakang adalah Aluk Todolo atau kepercayaan To Mimala.

Saat Islam datang di Kaleok, justru berakulturasi dengan kepercayaan To Mimala. Hal itu bisa dilihat saat berlangsungnya prosesi upacara-upacara adat, seperti kematian, pesta kawin, dan Maulid Nabi Muhammad saw dengan membuat syair (*cakkiri*). Cakkiri, adalah syair yang menggunakan dialek Pattae (salah satu etnis desa Batetangnga) yang dicampur dengan dialek Arab. Sebagian liriknya juga menggunakan bahasa Arab meski tidak terlalu pas dengan kaidah dan pelafalan huruf abjad arab. Isinya, memuji Nabi Muhammad dan ke-Esa-an Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi haji Tima’, To Mimala tidak berbeda dengan Islam. To Mimala juga percaya bahwa Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak bisa dirasionalkan. Mungkin yang membedakan hanyalah kitab sucinya. To Mimala menggunakan tradisi lisan dalam menyampaikan ajaran yang dikenal dengan *ampe-ampena todolo*.

Tima’ sendiri, sebagaimana juga mayoritas umat Islam lainnya, mendamba naik haji. Maka, ia pun ketika memiliki rezeki pergi ke tanah suci. Meski berhaji, kepercayaannya terhadap To Mimala tak luntur. Seusai naik haji, ia tetap melakukan ritual To Mimala, memberi sesajen pada pohon dan batu sebagai bagian dari cara mereka menyatu dengan alam. []

Haji Tima', tokoh To Mimala:

JIDAT YANG HITAM BUKAN MENJADI UKURAN

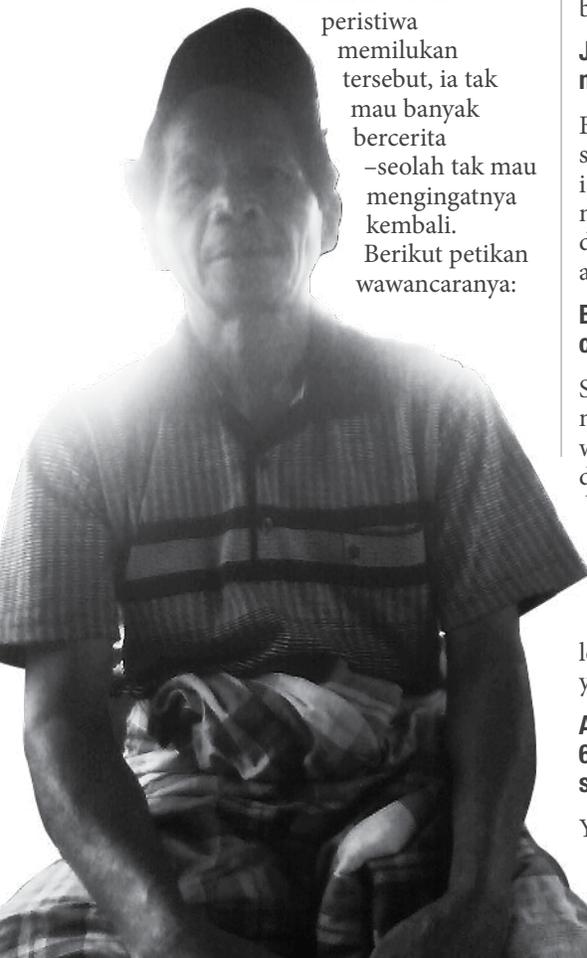
Oleh: Tamsil

Hanya karena berdoa di batu, pohon, dan kuburan, To Mimala dituduh sebagai ajaran musyrik yang harus dimusuhi dan diperangi. Padahal, cara seperti itu hanya untuk menghargai dan melestarikan alam. Esensinya tetap menyembah pada Yang Esa.

Meskipun demikian, berbagai cemohan dan anggapan miring yang menerpa penganut To Mimala, tak membuatnya bergeming. Tahun 1960an misalnya, komunitas To Mimala pernah dibumihanguskan oleh DI/TII karena dianggap musyrik. Namun mereka tetap melaksanakan keyakinan dan ritualnya meskipun jumlah mereka semakin berkurang. Bagi mereka, yang terpenting adalah niat.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tanggapan dan sikap penganut To Mimala terhadap berbagai tuduhan itu, kontributor DEPORT wilayah Sulawesi Barat, Tamsil, menemui tokoh To Mimala, Haji Tima' untuk berbincang-bincang seputar hal tersebut. Haji Tima' (70 th) juga adalah saksi dari peristiwa pembumihangusan tahun 1960-an itu. Namun, saat

membicarakan peristiwa memilukan tersebut, ia tak mau banyak bercerita –seolah tak mau mengingatkannya kembali. Berikut petikan wawancaranya:



Bagaimana dengan pandangan orang-orang yang menuduh To Mimala Musyrik?

Apanya yang musyrik? Berdoa di batu, pohon, adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap alam. Dalam agama Islam sendiri, selesai shalat di dalam masjid diperintahkan untuk bertebaran keluar mengurus urusan duniawi. Apa yang diniatkan dalam masjid itu yang dikerjakan saat keluar dari masjid. Jadi apa yang beda? Kami juga mengakui Tuhan Yang Maha Esa.

Saya pernah dengar kalau ada kelompok lain yang mengatasnamakan Islam datang di Kaleok untuk syiar Islam, dan memusyrikkan To Mimala?

Ya. Ia memakai jubah putih-putih dan memasak di dalam masjid, datang dengan susah payah memikul beras dan belanga. Tapi mereka hanya berdiam diri di masjid dan kelihatan jarang bekerja. Bagi kami, ajaran ini tidaklah sesuai ajaran To Mimala, karena seolah-olah tidak berhubungan dengan alam. Jidat yang hitam, bukan menjadi ukuran. Tapi bagaimana tanda yang hitam di jidat itu menjadi sikap dan bertingkah laku baik sesama manusia.

Jadi apa tindakan Kakek melihat mereka melakukan syiar itu?

Bagi To Mimala, bersikap biasa-biasa saja dan tidak ada yang memperdulikan ia melakukan syiarnya. Kami juga tetap melakukan ritual To Mimala. Pada akhirnya dengan sendirinya, lama-kelamaan, mereka akan keluar dari Kaleok.

Bagaimana Kakek mengatasi cemohan-cemohan orang dari luar?

Saya hanya diam dan berkata, mereka yang mencemooh To Mimala, apalagi kalau ia warga Batetangga, maka ia tidak mengenal dirinya dan lupa asal kejadiannya. Yang berkata begitu, saya pastikan kelak akan mendapat bencana.

Bila ada yang menghalangi ritual, Kek?

Saya akan mempertahankan tradisi kakek leluhur saya, pantang mundur apabila ada yang berani menghalanginya.

Apa Kakek ingat kembali peristiwa tahun 60-an To Mimala “dipaksa” memilih salah satu agama?

Ya. Memang ada kejadian itu. Itu terjadi setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Semacam gerombolan tentara. Begini, peristiwa yang Anda maksud tadi adalah peristiwa yang memilukan.

Bisa diceritakan lebih rinci, Kek?

(terdiam, tidak menjawab)

Bagaimana Kakek melupakan peristiwa itu?

Cara saya melupakan itu adalah memaknai ajaran To Mimala, yaitu berbuat baiklah sesama manusia. Saya selalu berupaya mendapatkan ketenangan. Itulah sebabnya saya diterima di setiap orang di mana saja. Ke kampung sebelah, saya dihormati. Kenapa saya dihormati? Karena saya juga hormati mereka. Ini disebut ajaran *sipakatau*

Apakah ini Kakek lakukan agar To Mimala tetap eksis?

Salah satu cara mengamalkan ajaran To Mimala. Buktinya saya tidak diusir oleh orang. Malah saya dikasih kedudukan ketika saya dipanggil acara pesta perkawinan atau acara *aqiqah* dan *ma'bongi* (haul).

Saat pembangunan masjid di Kaleok, bagaimana tanggapan Kakek?

Kami tetap terima dan tidak merusaknya. Malah kami pelihara keberadaannya, meskipun sebagian To Mimala masih enggan datang berjamaah ke masjid.

Apa ada yang mempengaruhi?

Kami di sini masih kurang ilmu tentang mengaji. Orang shalat memakai bacaan al-Qur'an, sedangkan kami ketika sembahyang menggunakan bahasa kakek moyang kami. Jangan heran kalau masjid biasa terlihat sepi.

Saat ini Kakek telah datang dari tanah suci, apa Kakek tidak keluar dari keyakinan To Mimala?

Naik haji itu adalah niat. Niat harus dilakukan. Seperti ketika berniat untuk memilih tempat melakukan ritual To Mimala di kuburan leluhur. Itu kan sama saja tergantung dari niat orang. []

Sulihin, Warga Dusun Passembarang: “TRADISI TO MIMALA AKAN HILANG DENGAN SENDIRINYA”

Oleh: Tamsil

“Ritual To Mimala jelas menyalahi aqidah agama Islam.” Demikian jawaban sekaligus pandangan dari Sulihin (40 th), salah seorang warga Dusun Passembarang, Desa Batetangnga, ketika ditanya soal ajaran To Mimala.

“Mereka menyembah batu, sungai dan pohon”

Sulihin menyandarkan argumentasinya pada al-Quran. “Orang yang mengaku beragama Islam tapi mempersembahkan hewan babi sebagai penolak *bala*’. Dalam al-Quran, hewan babi jelas diharamkan,” terangnya.

Tak hanya menyimpang dari aqidah Islam, namun penganut ajaran To Mimala oleh

Sulihin dicap syirik. “Mereka menyembah batu, sungai dan pohon,” ungkap lelaki yang sehari-harinya menjadi petani ini.

Untuk menguatkan penilaiannya itu, Sulihin menolak bahwa sesajen yang dibawa saat melakukan ritual To Mimala habis dimakan oleh penghuninya. Menurutnya, “Sesajen yang di taruh di baki itu habis dimakan oleh ular di dalam air atau dimakan

oleh ikan, bukan dimakan oleh penjaga sungainya,” sangkalnya. “Jadi, apakah ini bukan musyrik?” tanyanya menandakan.

Bagi Sulihin, To Mimala adalah praktek tradisi orang-orang dahulu yang belum mengenal agama Islam. Di sini, dia memberikan kesan dan citra bahwa To Mimala tak ubahnya seperti masyarakat

yang hidup dalam tradisi jahiliyah, sebelum datangnya Islam.

Namun demikian, tidak semua yang ada dalam ajaran To Mimala ia tolak. Masih ada yang dianggap baik dari tradisi tersebut. “Yang saya setuju dalam To Mimala adalah mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tapi saya tidak setuju kalau batu besar yang memberikan keselamatan,” ungkapnya.

Sulihin juga mengatakan bahwa keluarganya sendiri ada yang masih melakukan praktek penyembahan seperti itu. “Dan saya tantang mereka untuk berdebat. Hasilnya, generasi se-zaman dengan saya sudah meninggalkan praktek To Mimala.”

Di akhir pembicaraannya, Sulihin merasa yakin bahwa tradisi itu akan punah. “Biarkan saja orang tua yang melakukannya. Kedepan, tradisi itu akan hilang dengan sendirinya.” []

Lahudin, Pemerhati To Mimala

“TOLERANSI YANG DIMILIKI TO MIMALA SANGATLAH TINGGI”

Oleh: Tamsil

“Masing-masing orang punya jalan sendiri, kemauan sendiri, kepentingan sendiri,” jelas Lahudin (34) menanggapi pro kontra atas keberadaan komunitas To Mimala. Baginya, agama adalah ungkapan batin dari dalam diri manusia. Demikian juga berlaku bagi To Mimala.

Menurut Lahudin, babi yang dijadikan persembahan tidak harus dimaknai sebagai hewan haram seperti yang ada dalam agama Islam. “Tapi, bagi mereka (penganut To Mimala) babi adalah persyaratan penting dalam menolak bala,” tangkisnya.

Ia juga melihat bahwa selama ini, toleransi yang dimiliki oleh To Mimala sangatlah tinggi. Karenanya dia menyarankan, jika melihat atau memandang To Mimala hendaknya secara menyeluruh serta mendalam, jangan hanya sepotong-potong, apalagi permukaannya saja. “Sebuah kepercayaan yang datangnya dari nenek

moyang *Kaleok*, melahirkan banyak ilmu tentang kearifan lokal,” ujarnya.

Bagi Lahuddin, tradisi To Mimala adalah kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dijaga dan diberikan ruang tersendiri agar tetap eksis dan bergerak. “Saya sangat tidak senang kalau ada orang yang mengusik mereka,” katanya.

“Siapa lagi yang menjaga keseimbangan alam kalau bukan mereka? Negara yang diamankan untuk melindungi hutan tapi

negara juga yang merusaknya. Pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran saya adalah kenapa mereka selalu diusik? Toh mereka juga tidak mengusik orang di sekitarnya. Justru To Mimala punya kontribusi besar terhadap keseimbangan

alam,” tambahnya.

Lahudin juga menjelaskan bahwa problem yang dihadapi aliran To Mimala saat ini tidak hanya terkait dengan pandangan masyarakat yang begitu miring terhadapnya, namun juga harus berbenturan dengan kebijakan negara. “Lahirnya peraturan tiga menteri mengenai pelarangan menyebarkan syiar kepercayaan

“Siapa lagi yang menjaga keseimbangan alam kalau bukan mereka?”

yang tidak sesuai ajaran induknya (red-Islam), akan berimbas kepada eksistensi To Mimala. Munculnya SKB akan menyempitkan ruang gerak To Mimala,” jelasnya. []

TARMI, TKW BERNASIB TRAGIS DI ARAB SAUDI

Oleh: Sigit B. Setiawan

Pasangan Tarman dan Tarsih tak kuasa menahan tangisnya. Saat itu, tengah berlangsung acara pernikahan anak mereka, Tarmi. Tarman dan Tarsih, yang tinggal di dusun Serkan, Kabupaten Demak, sebelumnya tak pernah membayangkan bakal bertemu kembali dengan Tarmi, apalagi sampai bisa menikahkannya dengan Jasman di masa panen, Juli 2008.

Lebih dari dua tahun, Tarman dan Tarsih beserta keluarga yang lain, termasuk tetangga mereka, berusaha keras mencari tahu keberadaan dan nasib Tarmi yang tengah mengais rejeki di Arab Saudi. Mereka cemas, karena tak ada kabar dari Tarmi, bahkan sekedar melalui SMS. Kabar terakhir, melalui telepon, Tarmi mengingatkan, "Jangan telepon majikan

"Tarmi kelihatannya dipenjara karena kabur dari majikan."

saya lagi, saya telah pindah majikan," tutur Tarman menirukan Tarmi. Telepon itu terjadi di bulan lebaran 2006.

Kepanikan Tarman sekeluarga kian memuncak ketika dapat kabar buruk dari Lastri, tetangganya yang juga bekerja di kota Jazi, Arab Saudi. "Tarmi kelihatannya dipenjara karena kabur dari majikan. Di mana dan berapa lama, saya tidak tahu," tutur Lastri.

Demi mendapat kabar tentang anaknya, segala cara mereka tempuh. Bahkan Tarman dan Tarsih rela mengorbankan harta mereka yang tak seberapa. Jika dihitung, biaya yang mereka habiskan setara dengan harga 3 kerbau. Mulai dari membeli pulsa telepon, membayar dukun, sampai membayar sponsor dan tentangnya yang berada di Arab. Hasilnya, hanya satu kabar: Tarmi dipenjara di Arab Saudi. Itu pun masih remang-remang, tidak diketahui pasti sampai berapa lama dan dipenjara di daerah mana.

Kecemasan mereka kian tak karuan. Januari 2008, Tarman nekat berangkat ke Jakarta. Dengan didampingi tetangganya, ia melapor dan meminta bantuan ke sebuah LBH Buruh Migran agar anaknya bisa kembali ke Indonesia. Untuk biaya ke Jakarta, kali ini Tarman harus rela

menggadaikan motor satu-satunya.

Setelah melapor di LBH, Tarman agak tenang. Sebab kata petugas LBH, Kedutaan RI di Arab Saudi melaporkan bahwa bulan Maret 2008 TKI/TKW yang dipenjara di Arab akan dipulangkan ke Indonesia.

Dari Serkan Menuju Arab

Waktu itu, sekitar pertengahan Agustus 2002, Tarman dan Tarsih kaget lantaran Tarmi yang baru tamat SMP dan baru dua minggu masuk di Pondok Pesantren mengutarakan niatnya untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi. Alasan Tarmi, supaya bisa membantu kedua orang tuanya dan membiayai sekolah adiknya. Diperkuat bukti, kakak pertamanya, Taryani, baru saja pulang dari Arab Saudi dan berhasil membeli sebidang sawah, sepeda motor, dan mampu membiayai pernikahannya sendiri.

Di dusun Serkan sendiri, menjadi tenaga kerja di luar negeri adalah hal

yang biasa. Dari 1 RW yang terdiri dari 2 RT setidaknya ada sekitar 90 orang yang sedang dan pernah bekerja di luar negeri sebagai pembantu. "Rata-rata penduduk desa kami adalah buruh tani, dan hanya 19 orang yang menjadi pegawai negeri sipil sebagai guru atau pegawai tingkat kecamatan," ungkapnya.

Berbekal uang Rp. 310,000 dan bantuan sponsor (Amat), Tarmi berangkat ke Jakarta. Oleh Amat, Tarmi disalurkan ke salah satu perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berkantor di Halim, Jakarta Timur. Tak ada hambatan berarti bagi Tarmi untuk masuk PJTKI tersebut. Postur tubuh yang bongsor dan kesehatan yang prima menjadikan dia ditampung di asrama dengan hanya membayar ongkos 35 ribu rupiah.

Namun satu hal waktu itu yang membuat Tarmi takut tidak lolos, umurnya masih di bawah 17 tahun. "Namun saya beruntung, modus curang memalsukan KTP dan umur adalah hal yang umum di PJTKI," katanya. Uang saku dari bapaknya cukup untuk berdamai dengan petugas: hanya dengan Rp. 100,000. Dan, terdaftarlah Tarmi sebagai orang yang berhak mendapat paspor dan visa ke Arab Saudi.

Akhirnya, Februari 2003, Tarmi mulai menginjak kakinya di tanah Arab Saudi. Di sana, ia mendapatkan majikan di daerah Jizan, perbatasan Yaman yang jauh dari ibukota Arab Saudi, Riyadh. "Di dalam visa dan kontrak kerja saya tertera, Maret 2005 atau dua tahun lagi kontrak kerja dan visa saya habis. Artinya saya harus pulang," terangnya.

Dari situlah, nasib naas menghampirinya. Beberapa kali Tarmi mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari keluarga Thoib, Sang majikan. Tarmi berkisah bahwa surat dan telepon dari keluarganya di Serkan pernah tidak sampai ke dirinya, karena ditahan oleh anak Sang majikan. Tarmi baru tahu setelah sopir keluarga majikan menceritakan hal itu padanya.

Oleh majikan, Tarmi juga pernah ditahan agar tidak pulang ke Indonesia. Kata Sang majikan, "Tunggu sampai bulan haji. Dan saya akan menaikkan haji kamu." Tarmi akhirnya tak jadi pulang. Masa haji tiba, Tarmi pun berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji. Selama sembilan bulan menunggu haji, Tarmi tidak mendapatkan gaji.

Terakhir, Tarmi dituduh melarikan diri dan melakukan guna-guna terhadap keluarga majikannya. Tuduhan inilah yang kemudian menjadikan nasib Tarmi berujung di penjara. Selama 6 bulan, Tarmi berada di balik terali besi Arab Saudi.

Benarkah tuduhan itu? Tarmi sendiri tidak tahu dan bingung. "Sampai hari ini saya tidak tahu kenapa saya dipenjara. Saya dituduh memberikan guna-guna dan melarikan diri dari majikan. Memang saya pindah majikan bersama 2 kawan saya yang lain, kami selama 9 bulan tidak digaji. Kalau karena guna-guna saya tidak tahu. Dan saya difitnah teman saya dari Jawa Barat. Mungkin karena saya menagih uang saya yang dipinjamnya untuk biaya saya pulang," aku Tarmi.

Februari 2008, gaji Tarmi keluar. "Akhirnya, saya mendapatkan gaji saya yang tidak terbayar selama sembilan bulan. Dengan uang itu pula, saya membeli tiket pesawat untuk pulang. Sebetulnya saya bisa pulang lebih cepat, karena saya hanya dipenjara selama 6 bulan. Namun setelah dipenjara, saya tidak bisa kemana-mana karena tidak punya uang. Lama saya menanti, akhirnya gaji saya diberikan dan saya bisa pulang," ungkapnya. []



RITUAL KHONGHUCU

Sebelum terbitnya SE Mendagri 2006, bagi penganut Khonghucu yang ingin mendapatkan dokumen kependudukan harus mengkonversi agamanya ke agama lain. Sebuah pilihan yang menyakitkan. Namun apa daya, pilihan ini tidak mungkin ditolak kecuali semua urusan publik mereka akan berantakan. Jika mereka memaksa mencantumkan Khonghucu ke dalam dokumen kependudukan, secara defacto seluruh dokumen itu dianggap tidak ada (*undocumented persons*).

Harapan Belaka

Ternyata, harapan penganut Khonghucu di Kota Surabaya yang begitu besar dengan lahirnya SE sekedar utopia. SE Mendagri seperti pisau tumpul yang tidak mampu memutuskan tali diskriminasi. Surat ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa ketika berhadapan dengan Pemkot Surabaya, yang nota bene adalah bawahan Mendagri. Praktek diskriminasi terus terjadi dan menimpa penganut Khonghucu di Surabaya.

Praktek diskriminasi ini terjadi ketika Pemkot Surabaya berupaya

PENGAKUAN SETENGAH HATI TERHADAP PENGANUT KHONGHUCU

Oleh: Mashuri

Keluarnya Surat Edaran (SE) Mendagri 470/336/SJ, tertanggal 24 Februari 2006, membangkitkan luapan puji yang tak terkira bagi penganut Khonghucu di Surabaya. Betapa tidak, SE Mendagri itu, bagi mereka, adalah satu-satunya pisau pemotong belenggu diskriminasi yang sudah lama membelit mereka. SE Mendagri ini berisi pengakuan Khonghucu sebagai salah satu agama yang resmi di Indonesia.

Sebelumnya, pada era Orde Baru, penganut Khonghucu merasa kesulitan mencantumkan kata Khonghucu ke dalam kolom agama di atribusi kependudukan. Di Surabaya, ini menjadi pengalaman pahit oleh siapapun yang berhubungan dengan aktifitas Komisariat Majelis Daerah (KMD) Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Surabaya di Boen Boe Kapasan dan MAKIN KMD Jawa Timur di Pak Kik Bio Jagalan pada paruh akhir tahun 2000-2002.

Anly adalah salah satu contohnya. Nasib kependudukan Anly Cenggana dan keluarganya dipersulit oleh Dispenduk

Capil Pemkot Surabaya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum genap 24 jam dicabut secara sepihak oleh aparat Pemkot, serta Kartu Keluarga (KK) ditahan dan tak kunjung diberikan kepada Anly. Alasannya cuma satu, kolom agama di KTP dan KK Anly diisi Khonghucu. Tentu akan lain cerita jika Anly secara sukarela bersedia “menukarkan” agama Khonghucunya atau mengkonversinya ke salah satu agama yang dianggap resmi oleh Negara.

Nasib serupa juga dialami oleh Budi Widjaya dan Charles. Perkawinan Budi dengan Lanny dan Charles dengan Suryawati tidak diakui oleh Pemkot (Pemerintahan Kota) Surabaya. Waktu itu, status perkawinan mereka belum mendapatkan legalitas dari Dispenduk Capil. Jalan berliku terpaksa ditempuh kedua pasangan tersebut. Budi, misalnya, sekedar untuk mendapatkan selembarnya akta perkawinan, harus melakukan gugatan terlebih dahulu, mulai dari PTUN Surabaya, PTTN Jawa Timur hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Untungnya, di tangan MA, putusan kasasi berpihak kepada Budi-Lanny.

menerjemahkan kebijakan kependudukan yang terkodifikasi dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006. Sejak berlakunya UU tersebut, Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) mengarah pada pola tertib kependudukan berbasis pada *single identification number* bagi seluruh warganegara, termasuk umat Khonghucu. Salah satu kebutuhan SIAK model baru ini adalah, sidik jari seluruh penduduk Kota Surabaya. Yang membuat umat Khonghucu dan aktifis MAKIN heran adalah tidak adanya kolom khusus agama Khonghucu dalam dokumen yang harus diisi. Formatnya nyaris sama dengan format sebelumnya. Dalam daftar isian di kolom agama hanya dicantumkan lima agama ditambah satu kolom yang berisi kata, “agama lain”. Bagi penganut Khonghucu kolom ini membingungkan sekaligus menjengkelkan. Namun, begitu ditanya atas kejangalan ini, petugas pelayanan publik di Surabaya dengan enteng menjawabnya: “salah cetak”, “taruh atau isi saja di kolom agama lain”, “kalau merubah harus tender lagi”.

Ternyata legalitas Khonghucu masih diakui setengah hati. []

JALAN MENUJU PENEGUHAN IDENTITAS KE-USING-AN

Oleh: Sigit B. Setiawan

Menjelang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-63, 17 Agustus 2008, Banyuwangi kembali dihangatkan oleh dikursus mengenai pahlawan nasional. Untuk sebuah upaya peneguhan identitas dan rasa bangga daerah, Banyuwangi mengusung tiga nama pejuang agar bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Mereka adalah: Wong Agung Wilis, Rempeg Jagapati dan Mas Ayu Wiwit.

Ketiga tokoh lokal yang dianggap berjasa melawan kolonial semasa kerajaan Blambangan ini sebenarnya sudah diajukan ke pemerintah tiga tahun yang lalu untuk ditahbiskan dan ditempatkan diantara deretan nama-nama pahlawan nasional lain yang sudah diresmikan. Namun selama itu pula belum ada kabar dan tanda-tanda bakal dikabulkannya permintaan mereka. Pemerintah masih mensyaratkan penerbitan buku biografi masing-masing tokoh tersebut direkomendasikan oleh Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI).

Hasan Basri, salah satu budayawan lokal, mengatakan bahwa "Pengajuan pahlawan ini sangat penting untuk kebanggaan daerah, dan terbukti pada peringatan kemerdekaan RI sekarang ini banyak anak sekolah yang memerankan tokoh-tokoh tersebut."

Dalam konteks Banyuwangi, perdebatan mengenai hal-hal yang terkait dengan kebanggaan dan identitas kedaerahan sebenarnya bukanlah hal baru, utamanya di kalangan elit budaya dan politik daerah ini. Diskursus ke-Banyuwangi-an mulai dari sejarah, etnisitas, hari jadi, hingga budaya adalah hal lama yang selalu menemukan momentum kebaruannya. Persis seperti debat historiografi di kancah nasional, para elit budaya dan elit politik Banyuwangi tampaknya begitu dinamis melakukan interpretasi dalam merepresentasikan sejarah masa lalu Banyuwangi.

Pada tahun 2002, Bupati Banyuwangi kala itu, Samsul Hadi, dengan semangat berkobar mendeklarasikan gerakan budaya *Jenggirat Tangi*: sebuah gerakan peneguhan identitas Using yang diyakini sebagai wajah asli masyarakat lokal (Banyuwangi) dengan segala budaya, bahasa, dan kekayaan tradisinya. Menurut Samsul, masyarakat Banyuwangi adalah sisa-sisa kerajaan Blambangan yang terdesak oleh Mataram

Islam juga Kolonial Belanda. Suku serta bahasa mereka adalah Using.

Dari gerakan politik budaya *Jenggirat Tangi* ini, lahir proyek budaya dan identitas, yang terlacak, misalnya, dengan terbitnya beberapa Surat Keputusan (SK) Bupati bernomor 173 tertanggal 31 Desember 2002 dan SK bupati nomor 147 tahun 2007 tentang *Gandrung* (tari berpasangan) sebagai maskot wisata dan tari resmi penyambutan tamu (*Jejer Gandrung*). Ditambah dengan penerbitan kamus Bahasa Using, muatan lokal Bahasa Using dalam kurikulum pendidikan, penetapan hari jadi Banyuwangi, busana adat, buku resmi seni tradisi dan ritual (*Seblang dan Gandrung*), serta berbagai macam buku referensi yang mengarah pada pembakuan dan peneguhan identitas serta budaya tertentu. Dari sini, proyek peneguhan identitas kian menguat dan mendapat ruang yang lebar. Dari berbagai produk itu pula, Banyuwangi coba direpresentasikan.

Ironisnya, imaji identitas dan 'nasionalisme' masyarakat Banyuwangi yang dibayangkan oleh sekelompok elit tidak lain adalah 'terjemahan' pengetahuan dan catatan kolonial Belanda melalui pemikiran Lekkerkerker (Blambangan), Stoppelaar (Blambangan Adatrecht), Scholte (Gandroeng van Banjoewangi), van der Tuuk (Woorden van het Banjoewangisch dialect), Epp (Banjoewangi), Brandes (Verslag Over Een Babad Blambangan) dan sebagainya.

Catatan kolonial ini pula yang tampaknya sering dijadikan amunisi debat historiografi Banyuwangi, seperti terlacak dalam diskusi-diskusi dan karya tulis mereka yang saat ini menjadi 'acuan resmi' Using dan ke-Banyuwangi-an. Misalnya Hasan Ali (berdarah Pakistan) yang menyodorkan 3 sosok pahlawan lokal ini dalam *Banyuwangi: Sebuah Problematik, Sekilas Puputan Bayu: Sebagai Tonggak Sejarah Hari Jadi Banyuwangi Tanggal 18 Desember 1771, Kamus Bahasa Using* dan lain-lain. Begitu pun dengan Hasnan Singodimayan (Jawa-Santri) melalui *Seblang Perjuangan, Gandrung Banyuwangi, Kota Gandrung dan Serambi Mekkah*. Atau juga karya tulis lain dari budayawan Banyuwangi.

Akankah debat historiografi Banyuwangi hanya terjadi di meja-meja kelompok elit lokal saja? Dan hanya dari sana pula

jendela untuk melihat identitas Banyuwangi terbuka? Bukankah otonomi daerah dengan semangat desentralisasi memberi ruang selebar-lebarnya bagi mereka yang selama ini suaranya tidak pernah terdengar? []



MEDAN: ENAM HARI MENULIS KEANEKARAGAMAN

Oleh: Didit F. Utomo

Enam hari berturut-turut, dimulai tanggal 23 hingga 28 Juni 2008, 14 peserta terpilih mengikuti Sekolah Multikultural yang diselenggarakan oleh Desantara Foundation di Medan, Sumatra Utara. Kerjasama dan dukungan penuh dari Jurusan Ilmu Antropologi Universitas

“Yang kita inginkan adalah tulisan yang didapatkan dari pengalaman sehari-hari.”

Sumatra Utara (USU) sangat membantu bagi tercapainya tujuan awal sekolah multikultural Desantara: Mengencangkan ikatan budaya dan menghormati keanekaragaman. Hal itu juga bisa dilihat dari proses serta hasil presentasi masing-masing peserta tentang apa saja yang mereka tulis dan refleksikan selama kegiatan berlangsung.

“Yang kita inginkan adalah tulisan yang didapatkan dari pengalaman sehari-hari,” ujar salah satu fasilitator dari Desantara Foundation. Memang, pada awalnya, peserta terkesan normatif dalam menuangkan gagasan, menarasikannya seperti literatur kebanyakan, dan bukan dari

pengalamannya sendiri. Tetapi, setelah melalui beberapa latihan menulis dan diskusi yang begitu cair, para peserta tampak mulai terbiasa menuangkan pengalaman

kekehariannya (budaya) selama ini dalam bentuk tulisan. Bukan lagi sebuah model tulisan yang dirangkai dengan cara *comot sana comot sini*, bergerilya di tengah tumpukan pemikir-pemikir besar.

Salah seorang peserta yang beretnis Batak Mandailing bahkan menuliskan hubungan keluarganya, ia dan ayahnya, sebagai

pengalaman bagaimana karakternya dibentuk sampai pola relasi sosial yang terjalin. Semua itu dimulai dan berawal dari perbincangan hangat di atas sebuah meja makan. Selanjutnya, tema-tema seperti stereotipe etnis, realitas kehidupan jalanan, sampai pengelolaan sampah, mengalir begitu saja menjadi ide pembahasan dan tulisan yang menarik dari para peserta.

Berkah enam hari mengikuti Sekolah Multikultural di Medan, bahwa masing-masing orang, mampu mendialogkan perbedaan dan saling menghormati pemikiran, keluar dari fanatisme serta belunggu sesat fikir. Tak hanya mandeg sampai pelatihan usai, para peserta/alumni Sekolah Multikultural kemudian aktif menulis dan menjadikan website Desantara sebagai ruang untuk mengalirkan gagasan-gagasan mereka. []

BAYANG-BAYANG PABRIK SEMEN DI KESEHARIAN SEDULUR SIKEP

Oleh: Akbar Yumni

Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik Tbk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selama dua tahun terakhir menuai protes dan penolakan dari masyarakat, terutama masyarakat Samin yang tergabung dalam komunitas Sedulur Sikep. Pasalnya, Sedulur Sikep dan penduduk di sekitar lokasi rencana pembangunan pabrik, terutama Kecamatan Sukolilo, yang seluruhnya bermatapencaharian sebagai petani, merasa dirugikan jika harus kehilangan sumber-sumber alam yang menghidupi mereka selama ini.

Pendampingan Desantara Foundation di masyarakat Sedulur Sikep, selama ini lebih mengarah kepada pendekatan kultural dibandingkan pendekatan legal formal. Hal ini berkaitan dengan peran Desantara Foundation di masyarakat Sedulur Sikep dalam konteks pembelaan hak budaya dan ekonomi masyarakat, merupakan usaha menjawab kekosongan strategi advokasi di Pati selama ini yang kurang mengintegrasikan konflik dengan proses transformasi dan partisipasi masyarakat

dalam usahanya menolak keberadaan pabrik Semen Gresik di wilayah Sukolilo Pati. Modal-modal budaya yang ada selama ini di masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat di sekitarnya yang mengalami dampak dari akan didirikannya pabrik Semen Gresik, kurang dimanfaatkan secara efektif sebagai strategi advokasi. Dengan begitu, diharapkan antara gagasan proses advokasi dengan kesadaran masyarakat dapat disinergikan tanpa ada jarak.

Peran Desantara Foundation sendiri adalah banyak melakukan inisiasi terhadap proses integrasi antara pihak pendamping dan masyarakat yang mengalami konflik dan marginalisasi kebijakan, agar proses advokasi tidak meninggalkan proses transformasi, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi kasus yang melingkupi mereka. Semangat inilah yang kemudian dalam pendekatan advokasi Desantara meninggalkan pola *lawyer* dan *client* sebagai sarana penyelesaian konflik,

dimana masih menyisakan ketergantungan dan jarak kesadaran masyarakat dengan semangat pembelaan hak-hak sipil, khususnya kaum minoritas.

Sejauh ini, rencana pembangunan pabrik semen masih menunggu hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Desantara meninggalkan pola *lawyer* dan *client* sebagai sarana penyelesaian konflik.

(AMDAL) yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro, Semarang, serta surat keputusan (SK) Bupati Pati, Tasiman, tentang tata ruang dan tata wilayah (TR/TW) sampai akhir September 2008. Belakangan, pembuatan AMDAL kerap dipersoalkan masyarakat karena prosesnya yang kurang transparan, serta adanya cacat budaya karena proses sosialisasi yang tidak disesuaikan dengan kondisi dan pola komunikasi masyarakat. []